BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah mewajibkan sebahagian perbuatan bagi hamba-Nya, dan mengharamkan sebahagian yang lain melalui al-Qur'an dan menjelaskannya dalam Hadis Rasulullah SAW. Perintah dan larangan itu secara mutlak ada tanpa pengecualian dan tanpa menjelaskan sebab sebabnya, seperti Allah mewajibkan shalat, puasa dan mengharamkan zina, memakan riba, membunuh dan lain lain. Dan ada sebahagian perbuatan yang diwajibkan dan diharamkan yang dijelaskanNya sebab sebabnya seperti Allah mewajibkan zakat dan lain lain.

Agama Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia baik secara vertikal ataupun horizontal, hubungan kepada Tuhan sebagai pencipta ataupun kepada sesama manusia. Salah satu contoh pengaturan tersebut yaitu mengenai pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah peristiwa penting yang akan membentuk keluarga dan kekerabatan sesama manusia, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan bahagia.¹

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagai sebuah ketaatan terhadap perintah Allah. Perkawinan merupakan suatu akad

¹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan dilakukannya pernikahan ialah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia dan untuk memperoleh keturunan.² Di dalam al-Quran disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿الروم : ٢١﴾

Agar sebuah perkawinan dapat tercapai dengan sebenar-sebenarnya maka harus dipenuhi sejumlah persyaratan yang terdapat dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang telah memenuhi segala rukun dan syaratnya serta prosedur yang telah ditetapkan maka akad perkawinan yang demikian telah dipandang sah menurut agama dan negara. Namun sebaliknya jika sebuah perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.³

²Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Academia& Tazaffa, 2004), hlm. 37.

³Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan merupakan jalan yang diambil oleh seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana hal tersebut Nabi SAW juga bersabda:

“Wahai para pemuda barangsiapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (HR Bukhari-Muslim).⁴

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan akan mendapatkan akibat hukum yaitu mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.⁵

Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan

⁵Nasarudin Salim, “Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)”, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, np. 62 THN. XIV (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2004), hlm. 67.

sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang yang sama menentukan bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.⁶

Dari ketentuan yang dijelaskan di atas, perkawinan dapat dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, serta didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan harus dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat. Perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama dan kepercayaan tanpa didaftarkan di Kantor Urusan Agama tidak akan dianggap sah oleh negara. Sebaliknya, jika perkawinan hanya didaftarkan di Kantor Urusan Agama tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan agama, maka perkawinan tersebut juga tidak akan dianggap sah.

Perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak didaftarkan tidak memiliki jaminan hukum. Tujuan dari pencatatan perkawinan, seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah untuk menciptakan tata tertib dalam praktik perkawinan di masyarakat. Selain itu, tujuannya adalah untuk melindungi kesucian perkawinan dan lebih spesifik lagi, untuk melindungi hak-hak wanita dan anak dalam rumah tangga. Tanpa pencatatan perkawinan resmi, baik suami maupun istri tidak dapat menikmati hak-hak mereka yang telah diatur dalam hukum, karena mereka tidak memiliki bukti resmi pernikahan.

Isbat nikah merupakan langkah yang dapat diambil oleh pasangan yang telah

⁶Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm. 46.

menikah secara sah berdasarkan hukum agama dan tidak memiliki hambatan perkawinan sesuai hukum positif atau hukum syar'i, agar mendapat pengakuan resmi dari negara tentang pernikahan mereka. Dengan demikian, pernikahan tersebut memperoleh keabsahan hukum, sehingga pasangan yang menikah secara tidak tercatat dan semua konsekuensi yang muncul dari pernikahan tersebut dapat mendapatkan perlindungan hukum.

Isbat nikah adalah proses legalisasi perkawinan yang dilakukan melalui keputusan hakim dari pengadilan agama. Alasan dan motif untuk melakukan isbat nikah bervariasi, seperti adanya perkawinan yang sebelumnya hanya berbasis hukum Islam dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Fenomena perkawinan yang dilakukan secara tidak tercatat atau di bawah tangan ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa pasangan,⁷ ditemukan kejadian unik di salah satu KUA di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan yaitu di KUA Kecamatan Cempaka. Di wilayah ini, terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan siri kemudian ingin melaksanakan pernikahan yang tercatat di KUA, namun untuk memudahkan proses administrasi mereka tidak memberikan keterangan kepada PPN bahwa mereka telah pernah melakukan pernikahan siri,

⁷Dicantumkan 2 orang masyarakat yang melakukan praktik *bahilah* dalam pernikahan ulang yaitu: 1. (N), melakukan pernikahan siri pada tanggal 23 April 2020 dan kembali melakukan pernikahan ulang pada 24 Juni 2020, alasan utama mereka melakukan pernikahan ulang yaitu untuk mendapatkan legalitas. 2. (D), melakukan pernikahan siri pada tanggal 16 November 2022 dan kembali melakukan pernikahan ulang pada tanggal 19 Desember 2022. Mereka melakukan pernikahan ulang di KUA tanpa diketahui pernikahan siri sebelumnya oleh PPN, dan mereka menyegerakan untuk melakukan pernikahan ulang tersebut sebelum memiliki anak.

sehingga berkas pernikahan mereka tetap diterima oleh pihak KUA.

Proses ini umumnya diawali dengan pernikahan secara agama atau yang tidak tercatat, setelah itu masyarakat mendaftarkan keinginan mereka untuk menikah ke KUA dan melakukan akad nikah kembali secara resmi yang dilaksanakan di KUA setempat.

Faktor penyebab masyarakat melakukan hal ini antara lain dikarenakan calon pengantin merasa bahwa prosedur untuk melakukan pernikahan yang terdaftar dianggap terlalu sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk menikah tidak tercatat terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di kebanyakan wilayah lainnya. Di wilayah lain, jika calon pengantin telah melakukan pernikahan tidak tercatat, mereka biasanya akan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dengan demikian, mereka tidak perlu melakukan pernikahan ulang di KUA.

Pasangan yang telah melakukan pernikahan siri tersebut melakukan pendaftaran nikah ke KUA dan melakukan pernikahan kembali secara resmi. Namun syaratnya tidak memiliki anak, namun jika sudah memiliki anak terpaksa mereka tetap melakukan itsbat nikah. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai praktik *bahilah* yaitu untuk mencari jalan keluar bagi pasangan yang ingin melegalkan pernikahan mereka.

Hal ini penulis katakan sebagai praktik *bahilah* karena praktik di masyarakat yang mencari solusi dari pernikahan yang tidak tercatat sebelumnya, sehingga pernikahan mereka legal. Diketahui atau tidak mereka sudah menikah sebelumnya

mereka tetap memberi keterangan bahwa tidak pernah menikah. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik masyarakat tersebut dan faktor apa yang melatar belakangi masyarakat melakukan hal demikian dan menuangkannya kedalam sebuah penelitian dengan judul Praktik *Bahilah* Pada Pernikahan Ulang Di Masyarakat Banjar (Studi Kasus Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik *Bahilah* Dalam Pernikahan Ulang Masyarakat Banjar Di Kota Banjarbaru?
2. Bagaimana Respon Kepala KUA Terhadap Praktik *Bahilah* dalam Pernikahan Ulang Masyarakat Banjar di Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Praktik *Bahilah* Dalam Pernikahan Ulang Pada Masyarakat Banjar Sebagai Jalan Keluar dalam Pernikahan Siri;
2. Untuk Menemukan Respon Kepala KUA Terhadap Praktik *Bahilah* Yang Dianggap Sebagai Bagian Dari Jalan Keluar Bagi Masyarakat Yang Melaksanakan Pernikahan Secara Siri.

D. Manfaat Penelitian/Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah referensi ilmiah dalam bidang Hukum Keluarga, khususnya mengenai permasalahan yang akan dikaji, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya memperkaya bahan

pengembangan dan ilmu pengetahuan bagi kepastakaan di Pascasarjana jurusan Hukum Keluarga khususnya dan kepastakaan UIN Antasari umumnya. Sedangkan secara praktis penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk mengurangi praktik pernikahan sirri di Kota Banjarbaru.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis membuat definisi operasioanal tentang pernikahan ulang:

Bahilah adalah praktik yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan siri kemudian ingin melaksanakan pernikahan yang tercatat di KUA, namun untuk memudahkan proses administrasi maka mereka mengaku belum pernah menikah sebelumnya.

Pernikahan ulang merujuk pada proses menikah lagi yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *tajdid an-nikah*, di mana *tajdid* berarti pembaruan. Dalam konteks ini, pembaruan mengacu pada pembaruan pernikahan, yang berarti telah terjadi akad nikah yang sah menurut hukum agama sebelumnya. Pada penelitian ini pernikahan ulang yaitu upaya dari pasangan untuk pencatatan nikah siri yang dilakukan ulang oleh pasangan di Kantor Urusan Agama yang mana sebelumnya pasangan tersebut telah menikah secara tidak tercatat atau secara siri tanpa diketahui oleh pegawai pencatat nikah.

F. Penelitian Terdahulu/Kajian Pustaka

Menelaah dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti menemukan adanya perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, adapun yang dimaksudkan ialah:

"Buku berjudul 'Fenomena Itsbat Nikah pada Masyarakat Metropolitan'⁸ karya Gusti Muzainah dan Miftah Faridh tahun 2021 merupakan hasil penelitian tentang meningkatnya permohonan itsbat nikah di kota Banjarbaru. Penulis berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan itsbat nikah di kota tersebut. Dari penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa faktor dominan di balik banyaknya permohonan itsbat nikah adalah budaya hukum masyarakat, yang beranggapan bahwa hukum agama sudah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan mereka." Bertolak belakang dengan penelitian yang akan penulis lakukan di Kota Banjarbaru yang mana masyarakat disana lebih memilih untuk melakukan pernikahan ulang di KUA dari pada melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Penelitian berjudul "Praktik Tajdīdun Nikah di Kota Banjarbaru"⁹ yang dilakukan oleh Zaini Ghani pada tahun 2019, membahas fenomena di mana masyarakat yang awalnya menikah secara sirri (tidak tercatat) mencoba memperoleh legalitas perkawinan mereka melalui proses tajdīdun nikah atau

⁸Gusti Muzainah and Miftah Faridh, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan; Studi Di Kota Banjarbaru* (Banjarbaru: Pustaka Pranala, 2021).

⁹Zaini Ghani, "Praktik Tajdīdun Nikah Di Kota Banjarbaru" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarbaru, 2019).

pembaharuan nikah. Penelitian ini dilakukan melalui metode lapangan dengan wawancara sebagai teknik utama pengumpulan data. Ghani mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan tajdidun nikah, seperti keinginan memiliki buku akta nikah, mendapatkan pengakuan legal dari negara untuk anak-anak mereka, dan sebagainya. Ia juga mengamati bahwa Kepala Kantor Urusan Agama tidak menolak praktik ini, meski mereka memeriksa syarat-syarat fikih pernikahan sebelumnya dan menyarankan proses itsbat di Pengadilan Agama jika memenuhi kriteria. Menurut penelitian Ghani, ini membuka pandangan baru pada bagaimana masyarakat berusaha memanfaatkan prosedur hukum yang ada untuk mengakomodasi kebutuhan dan kondisi mereka. Penelitian tersebut hanya membahas tajdid nikah secara umum dan pendapat kepala KUA tentang praktik tersebut, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan ditinjau dari aspek sosiologi dan antropologi hukum.

Penelitian berjudul “Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman Perspektif Sosiologis”¹⁰ yang dilakukan oleh Ikrimah Safutri pada tahun 2023, penulis meneliti tentang praktik nikah ulang pasangan pelajar Hadramaut Yaman yang memiliki kesamaan dengan praktik yang dilakukan di Indonesia. Namun, memiliki perbedaan yaitu dari proses taukil wali yang dilakukan dengan bimbingan ulama ataupun guru sebanyak tiga kali. Dan sering dikatakan bahwa pernikahan yang mereka lakukan yaitu secara sirri. Pasangan pelajar yang memilih

¹⁰Ikrimah Safutri, “*Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman Dalam Perspektif Sosiologis*” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarbaru), 2023.

melakukan pernikahan ulang dan tidak melakukan itsbat nikah, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan hukum. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan meninjau praktik pernikahan ulang dari aspek sosiologi dan antropologi hukum.

Penelitian yang berjudul “Tajdid Nikah Sebagai Sarana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dalam Praktik Tajdid Nikah)”¹¹ oleh Afnan Riani Cahya Ananda Tahun 2021 penelitian ini menunjukkan bahwa tajdid nikah terjadi karena peran dari masyarakat dan tokoh agama yang masih menjadikan tajdid nikah sebagai solusi untuk mereka melegalkan perkawinan yang dilakukan secara siri. Penelitian ini menggunakan teori peran. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu praktik pernikahan ulang dengan pendekatan sosiologi dan antropologi hukum dengan teori kesadaran hukum dan efektivitas hukum.

Penelitian yang berjudul “Analisi Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”¹² oleh Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin tahun 2020. Akad nikah pertama yang dilakukan secara resmi di KUA setempat kemudian dilakukan tajdid nikah kembali dikarenakan banyak problematika yang muncul sehingga pasangan

¹¹Afnan Riani Cahya Ananda, “*Tajdid Nikah Sebagai Sarana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dalam Praktik Tajdid Nikah)*” 2021.

¹²Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin, “Analisi Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, dalam *Jurnal Salimiya*, Vol. 1, No. 2, 2020.

tersebut berkeinginan untuk melakukan tajdid nikah. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pernikahan ulang dilakukan karena pernikahan sebelumnya yang dilakukan secara siri, dan untuk mendapatkan legalitas dalam pernikahannya pasangan tersebut mengulang pernikahannya kembali di KUA setempat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan pada penelitian ini maka diperlukan sebuah sistematika penulisan yang tersusun dari latar belakang sampai dengan penutup. Penulis dalam penelitian ini sesudah proposal penelitian ini disetujui dan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian akan membagi kedalam lima bab pembahasan yang akan penulis uraikan dibawah ini:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang yang menjelaskan permasalahan yang akan penulis teliti, rumusan masalah yang mengandung fokus permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap penelitian yang diteliti, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kajian teori, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Dengan adanya pendahuluan maka akan terlihat gambaran umum tentang penelitian yang akan penulis lakukan serta langkah-langkah yang akan dilakukan agar terselesaikannya permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai pernikahan ulang yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Banjarbaru dalam perspektif sosiologi dan antropologi hukum.

BAB II memuat tentang tinjauan teoretis yang berisikan tentang teori yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang hukum pencatatan perkawinan baik itu menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan, pernikahan siri, serta konsep pernikahan ulang jika dilihat dari perspektif sosiologi dan antropologi hukum.

BAB III: Metode Penelitian. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel diakhiri dengan analisis data.

BAB IV: berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari praktik pernikahan ulang pasangan tidak tercatat di Kota Banjarbaru, efektivitas aturan hukum tentang pencatatan perkawinan, serta akan dianalisis dengan perspektif sosiologi dan antropologi hukum agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik pernikahan ulang yang mereka lakukan.

BAB V Penutup, yaitu bab terakhir yang memuat simpulan dan rekomendasi terhadap penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pernikahan ulang yang ada di Kota Banjarbaru.

Diakhiri dengan Lampiran-Lampiran berisikan hasil dokumentasi pada saat penelitian dilaksanakan.